



RENCANA KERJA KEMENKO KUMHAM IMIPAS TAHUN 2026



JALAN H.R. RASUNA SAID KAV. X6 NO.8 KUNINGAN,
JAKARTA SELATAN 12940

REKAP 1: K/L

RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L)

TAHUN ANGGARAN 2026

- 1. KEMENTERIAN/LEMBAGA** : KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG HUKUM, HAK ASASI MANUSIA, IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN
- 2. VISI** : Terwujudnya sinergi pembangunan bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan yang berkeadilan dan inklusif dalam mewujudkan Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045
- 3. MISI** :
1. Meningkatkan sinkronisasi dan koordinasi pelaksanaan pembangunan bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan
2. Melaksanakan Reformasi Birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan dalam mewujudkan tata Kelola pemerintah yang bersih

4. PRIORITAS NASIONAL

KODE	PRIORITAS NASIONAL	ALOKASI 2026 (RIBU)
07	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	279.510,0
Total		279.510,0

5. SASARAN STRATEGIS DAN INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS K/L

KODE	SASARAN STRATEGIS / INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS K/L	TARGET 2026	ALOKASI 2026 (RIBU)
01	Terwujudnya sinergi Pembangunan Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan		58.862.334,0
01.01	Indeks Pembangunan Hukum (indikator RPJMN)	0,70	
01.02	Indeks sinergitas Pembangunan Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan	0,80	
02	Terwujudnya reformasi birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan		163.072.188,0
02.01	Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan	72,83	
Total			221.934.522,0

6. PROGRAM DAN PENDANAAN

KODE	PROGRAM	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2026											PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)		
		RP	PNBP	BLU	PLN	RMP	PDN	HIBAH	PH	SBSN	HN	TOTAL	2027	2028	2029
130.CL	Program Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan	58.862.334,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	58.862.334,0	0,0	0,0	0,0
130.WA	Program Dukungan Manajemen	163.072.188,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	163.072.188,0	0,0	0,0	0,0
Total		221.934.522,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	221.934.522,0	0,0	0,0	0,0

Jakarta, 02 Maret 2026

REKAP 1A: K/L

RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L)

TAHUN ANGGARAN 2026

1. KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG HUKUM, HAK ASASI MANUSIA, IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN
2. VISI : Terwujudnya sinergi pembangunan bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan yang berkeadilan dan inklusif dalam mewujudkan Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045
3. MISI : 1. Meningkatkan sinkronisasi dan koordinasi pelaksanaan pembangunan bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan
2. Melaksanakan Reformasi Birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan dalam mewujudkan tata Kelola pemerintah yang bersih

4. PRIORITAS NASIONAL

KODE	PRIORITAS NASIONAL	ALOKASI 2026 (RIBU)
07	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	279.510,0
Total		279.510,0

5. SASARAN STRATEGIS DAN INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS K/L

KODE	SASARAN STRATEGIS / INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS K/L	TARGET 2026	ALOKASI 2026 (RIBU)
01	Terwujudnya sinergi Pembangunan Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan		58.862.334,0
01.01	Indeks Pembangunan Hukum (indikator RPJMN)	0,70	
01.02	Indeks sinergitas Pembangunan Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan	0,80	

KODE	SASARAN STRATEGIS / INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS K/L	TARGET 2026	ALOKASI 2026 (RIBU)
02	Terwujudnya reformasi birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan		163.072.188,0
02.01	Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan	72,83	
Total			221.934.522,0

6. PROGRAM DAN PENDANAAN

KODE	PROGRAM	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2026											PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)		
		RP	PNBP	BLU	PLN	RMP	PDN	HIBAH	PH	SBSN	HN	TOTAL	2027	2028	2029
130.CL	Program Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan	58.862.334,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	58.862.334,0	0,0	0,0	0,0
130.WA	Program Dukungan Manajemen	163.072.188,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	163.072.188,0	0,0	0,0	0,0
Total		221.934.522,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	221.934.522,0	0,0	0,0	0,0

Jakarta, 02 Maret 2026

REKAP 2: PROGRAM K/L

RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L)

TAHUN ANGGARAN 2026

1. KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG HUKUM, HAK ASASI MANUSIA, IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN
2. SASARAN STRATEGIS K/L YANG DIDUKUNG : 02 - Terwujudnya reformasi birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan
3. PROGRAM : Program Dukungan Manajemen
4. PRIORITAS NASIONAL

KODE	PRIORITAS NASIONAL / PROGRAM PRIORITAS	ALOKASI 2026 (RIBU)
Total		0,0

5. SASARAN PROGRAM (OUTCOME) DAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)

KODE	SASARAN PROGRAM / INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)	TARGET 2026	ALOKASI 2026 (RIBU)
01	Optimalnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi General Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan		163.072.188,0
01.01	Indeks Reformasi Birokrasi General Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan	72,83	
Total			163.072.188,0

6. KEGIATAN DAN PENDANAAN

KODE	PROGRAM	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2026											PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)		
		RP	PNBP	BLU	PLN	RMP	PDN	HIBAH	PH	SBSN	HN	TOTAL	2027	2028	2029
7150	Dukungan Manajemen Sekretariat Kementerian Koordinator	160.187.532,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	160.187.532,0	0,0	0,0	0,0
8020	Dukungan Manajemen Bidang Koordinasi Hukum	772.783,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	772.783,0	0,0	0,0	0,0
8021	Dukungan Manajemen Bidang Koordinasi HAM	772.033,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	772.033,0	0,0	0,0	0,0

KODE	PROGRAM	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2026											PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)		
		RP	PNBP	BLU	PLN	RMP	PDN	HIBAH	PH	SBSN	HN	TOTAL	2027	2028	2029
8022	Dukungan Manajemen Bidang Koordinasi Imigrasi dan Pemasarakatan	776.779,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	776.779,0	0,0	0,0	0,0
8023	Dukungan Manajemen Pengawasan Internal	563.061,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	563.061,0	0,0	0,0	0,0
Total		163.072.188,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	163.072.188,0	0,0	0,0	0,0

Jakarta, 02 Maret 2026

REKAP 2: PROGRAM K/L

RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L)

TAHUN ANGGARAN 2026

1. KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG HUKUM, HAK ASASI MANUSIA, IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN
2. SASARAN STRATEGIS K/L YANG DIDUKUNG : 02 - Terwujudnya reformasi birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan
3. PROGRAM : Program Dukungan Manajemen
4. PRIORITAS NASIONAL

KODE	PRIORITAS NASIONAL / PROGRAM PRIORITAS	ALOKASI 2026 (RIBU)
Total		0,0

5. SASARAN PROGRAM (OUTCOME) DAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)

KODE	SASARAN PROGRAM / INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)	TARGET 2026	ALOKASI 2026 (RIBU)
01	Optimalnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi General Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan		163.072.188,0
01.01	Indeks Reformasi Birokrasi General Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan	72,83	
Total			163.072.188,0

6. KEGIATAN DAN PENDANAAN

KODE	PROGRAM	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2026											PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)		
		RP	PNBP	BLU	PLN	RMP	PDN	HIBAH	PH	SBSN	HN	TOTAL	2027	2028	2029
7150	Dukungan Manajemen Sekretariat Kementerian Koordinator	160.187.532,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	160.187.532,0	0,0	0,0	0,0
8020	Dukungan Manajemen Bidang Koordinasi Hukum	772.783,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	772.783,0	0,0	0,0	0,0
8021	Dukungan Manajemen Bidang Koordinasi HAM	772.033,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	772.033,0	0,0	0,0	0,0

KODE	PROGRAM	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2026											PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)		
		RP	PNBP	BLU	PLN	RMP	PDN	HIBAH	PH	SBSN	HN	TOTAL	2027	2028	2029
8022	Dukungan Manajemen Bidang Koordinasi Imigrasi dan Pemasarakatan	776.779,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	776.779,0	0,0	0,0	0,0
8023	Dukungan Manajemen Pengawasan Internal	563.061,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	563.061,0	0,0	0,0	0,0
Total		163.072.188,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	163.072.188,0	0,0	0,0	0,0

Jakarta, 02 Maret 2026

REKAP 2A: PROGRAM K/L

RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L)

TAHUN ANGGARAN 2026

1. KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG HUKUM, HAK ASASI MANUSIA, IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN
2. UNIT ORGANISASI : 01 - Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan
3. SASARAN STRATEGIS K/L YANG DIDUKUNG : 01 - Terwujudnya sinergi Pembangunan Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan
4. PROGRAM : Program Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan
5. PRIORITAS NASIONAL

KODE	PRIORITAS NASIONAL / PROGRAM PRIORITAS	ALOKASI 2026 (RIBU)
07	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	279.510,0
07.03	Penguatan Kelembagaan, Pelayanan dan Penegakan Hukum	279.510,0
Total		279.510,0

6. SASARAN PROGRAM (OUTCOME) DAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)

KODE	SASARAN PROGRAM / INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)	TARGET 2026	ALOKASI 2026 (RIBU)
01	Terwujudnya pembangunan hukum, capaian kinerja dan penyelesaian permasalahan lintas K/L di bidang hukum		47.437.170,0
01.01	Persentase rekomendasi kebijakan yang dimanfaatkan K/L terkait pilar pembangunan hukum pada IPH	100	
01.02	Persentase capaian kinerja Kementerian Hukum	90	
01.03	Persentase rekomendasi kebijakan yang dimanfaatkan K/L dalam penyelesaian permasalahan lintas K/L di bidang hukum	100	
02	Terwujudnya capaian kinerja dan penyelesaian permasalahan lintas K/L terkait penghormatan, pemajuan, perlindungan, penegakan dan pemenuhan HAM		5.582.432,0
02.01	Persentase capaian kinerja Kementerian Hak Asasi Manusia	75	
02.02	Persentase rekomendasi kebijakan yang dimanfaatkan K/L dalam penyelesaian permasalahan lintas K/L di Bidang HAM	100	

KODE	SASARAN PROGRAM / INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)	TARGET 2026	ALOKASI 2026 (RIBU)
03	Terwujudnya capaian kinerja dan penyelesaian permasalahan lintas K/L terkait Keimigrasian dan Pemasarakatan		5.842.732,0
03.01	Persentase capaian kinerja Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan	90	
03.02	Persentase rekomendasi kebijakan yang dimanfaatkan K/L dalam penyelesaian permasalahan lintas K/L di bidang Imigrasi dan Pemasarakatan	100	
Total			58.862.334,0

7. KEGIATAN DAN PENDANAAN

KODE	PROGRAM	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2026											PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)		
		RP	PNBP	BLU	PLN	RMP	PDN	HIBAH	PH	SBSN	HN	TOTAL	2027	2028	2029
7151	Koordinasi Bidang Hukum	47.437.170,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	47.437.170,0	0,0	0,0	0,0
7152	Koordinasi Bidang Hak Asasi Manusia	5.582.432,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5.582.432,0	0,0	0,0	0,0
7153	Koordinasi Bidang Keimigrasian dan Pemasarakatan	5.842.732,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5.842.732,0	0,0	0,0	0,0
Total		58.862.334,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	58.862.334,0	0,0	0,0	0,0

Jakarta, 02 Maret 2026

REKAP 2A: PROGRAM K/L

RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L)

TAHUN ANGGARAN 2026

1. KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG HUKUM, HAK ASASI MANUSIA, IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN
2. UNIT ORGANISASI : 01 - Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan
3. SASARAN STRATEGIS K/L YANG DIDUKUNG : 02 - Terwujudnya reformasi birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan
4. PROGRAM : Program Dukungan Manajemen
5. PRIORITAS NASIONAL

KODE	PRIORITAS NASIONAL / PROGRAM PRIORITAS	ALOKASI 2026 (RIBU)
Total		0,0

6. SASARAN PROGRAM (OUTCOME) DAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)

KODE	SASARAN PROGRAM / INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)	TARGET 2026	ALOKASI 2026 (RIBU)
01	Optimalnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi General Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan		163.072.188,0
01.01	Indeks Reformasi Birokrasi General Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan	72,83	
Total			163.072.188,0

7. KEGIATAN DAN PENDANAAN

KODE	PROGRAM	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2026											PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)		
		RP	PNBP	BLU	PLN	RMP	PDN	HIBAH	PH	SBSN	HN	TOTAL	2027	2028	2029
7150	Dukungan Manajemen Sekretariat Kementerian Koordinator	160.187.532,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	160.187.532,0	0,0	0,0	0,0
8020	Dukungan Manajemen Bidang Koordinasi Hukum	772.783,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	772.783,0	0,0	0,0	0,0

KODE	PROGRAM	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2026											PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)		
		RP	PNBP	BLU	PLN	RMP	PDN	HIBAH	PH	SBSN	HN	TOTAL	2027	2028	2029
8021	Dukungan Manajemen Bidang Koordinasi HAM	772.033,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	772.033,0	0,0	0,0	0,0
8022	Dukungan Manajemen Bidang Koordinasi Imigrasi dan Pemasarakatan	776.779,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	776.779,0	0,0	0,0	0,0
8023	Dukungan Manajemen Pengawasan Internal	563.061,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	563.061,0	0,0	0,0	0,0
Total		163.072.188,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	163.072.188,0	0,0	0,0	0,0

Jakarta, 02 Maret 2026

REKAP 3: KEGIATAN K/L

RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L)

TAHUN ANGGARAN 2026

1. KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG HUKUM, HAK ASASI MANUSIA, IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN
2. PROGRAM : CL - Program Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan
3. SASARAN PROGRAM : 01 - Terwujudnya pembangunan hukum, capaian kinerja dan penyelesaian permasalahan lintas K/L di bidang hukum
4. KEGIATAN : 7151 - Koordinasi Bidang Hukum
5. UNIT ORGANISASI (ESELON 2) : 11 - Asisten Deputi Koordinasi Tata Kelola Administrasi Hukum
14 - Asisten Deputi Koordinasi Pemanfaatan, Pemberdayaan, dan Pelindungan Kekayaan Intelektual
10 - Asisten Deputi Koordinasi Materi Hukum dan Keadilan Restoratif
16 - Asisten Deputi Koordinasi Budaya, Informasi dan Komunikasi Hukum
15 - Asisten Deputi Koordinasi Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Litigasi
03 - Deputi Bidang Koordinasi Hukum

6. SASARAN KEGIATAN

KODE	SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	TARGET 2026	ALOKASI 2026 (RIBU)
01	Terwujudnya tindak lanjut rekomendasi kebijakan capaian kinerja dan penyelesaian permasalahan lintas K/L terkait tata kelola administrasi hukum		1.012.259,0
01.01	Persentase rekomendasi kebijakan capaian kinerja terkait tata kelola administrasi hukum yang ditindaklanjuti	100	
01.02	Persentase rekomendasi kebijakan yang ditindaklanjuti oleh K/L terkait penyelesaian permasalahan lintas K/L di Bidang Tata Kelola Administrasi Hukum	100	
02	Terwujudnya tindak lanjut rekomendasi kebijakan capaian kinerja dan penyelesaian permasalahan lintas K/L terkait Pemanfaatan, Pemberdayaan dan Pelindungan KI		989.658,0
02.01	Persentase rekomendasi kebijakan capaian kinerja terkait pemanfaatan, pemberdayaan dan pelindungan KI yang ditindaklanjuti	100	
02.02	Persentase rekomendasi kebijakan yang ditindaklanjuti oleh K/L terkait penyelesaian permasalahan lintas K/L di Bidang Pemanfaatan, Pemberdayaan dan pelindungan KI	100	
03	Terwujudnya tindak lanjut rekomendasi kebijakan capaian kinerja pembangunan hukum dan penyelesaian permasalahan lintas K/L terkait materi hukum dan keadilan restoratif		42.580.571,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	TARGET 2026	ALOKASI 2026 (RIBU)
03.01	Persentase rekomendasi kebijakan terkait pilar pembangunan hukum (materi hukum, kelembagaan hukum dan penegakan hukum) yang ditindaklanjuti	100	
03.02	Persentase rekomendasi kebijakan capaian kinerja terkait Materi hukum dan Keadilan Restoratif yang ditindaklanjuti	100	
03.03	Persentase rekomendasi kebijakan yang ditindaklanjuti oleh K/L terkait penyelesaian permasalahan lintas K/L di Bidang materi hukum dan Keadilan Restoratif	100	
04	Terwujudnya tindak lanjut rekomendasi kebijakan capaian kinerja pembangunan hukum dan penyelesaian permasalahan lintas K/L terkait Budaya, Informasi dan Komunikasi Hukum		1.793.265,0
04.01	Persentase rekomendasi kebijakan terkait pilar pembangunan hukum (budaya, informasi dan komunikasi hukum) yang ditindaklanjuti	100	
04.02	Persentase rekomendasi kebijakan capaian kinerja terkait budaya, informasi dan komunikasi hukum yang ditindaklanjuti	100	
04.03	Persentase rekomendasi kebijakan yang ditindaklanjuti oleh K/L terkait penyelesaian permasalahan lintas K/L di Bidang Budaya, Informasi dan Komunikasi Hukum	100	
05	Terwujudnya tindak lanjut rekomendasi kebijakan capaian kinerja dan penyelesaian permasalahan lintas K/L terkait Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan litigasi		1.061.417,0
05.01	Persentase rekomendasi kebijakan capaian kinerja terkait pembentukan peraturan perundang-undangan dan litigasi yang ditindaklanjuti	100	
05.02	Persentase rekomendasi kebijakan yang ditindaklanjuti oleh K/L terkait penyelesaian permasalahan lintas K/L di Bidang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan litigasi	100	
Total			47.437.170,0

7. RINCIAN KEGIATAN

A. PEMETAAN KEGIATAN

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
Total											47.437.170,0

B. PERHITUNGAN PENDANAAN (TAHUN 2026 DAN PRAKIRAAN MAJU)

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	TAHUN 2026			PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)						
		VOLUME / TARGET	SATUAN	SATUAN BIAYA	ALOKASI 2026 (RP RIBU)	VOLUME / TARGET			ALOKASI (RIBU)		
						2027	2028	2029	2027	2028	2029
01	Terwujudnya tindak lanjut rekomendasi kebijakan capaian kinerja dan penyelesaian permasalahan lintas K/L terkait tata kelola administrasi hukum				1.012.259,0				0,0	0,0	0,0
01.ABD	Kebijakan Bidang Hukum dan HAM		Rekomendasi Kebijakan		536.824,0				0,0	0,0	0,0
01.ABD.001	Rekomendasi kebijakan capaian kinerja dan penyelesaian permasalahan lintas K/L terkait tata kelola administrasi hukum	2	Rekomendasi Kebijakan		536.824,0	2	2	2	0,0	0,0	0,0
01.ABD.001.005	Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit	2,0	Rekomendasi Kebijakan	268.412,0	536.824,0	2,0	2,0	2,0	0,0	0,0	0,0
01.AEA	Koordinasi		kegiatan		475.435,0				0,0	0,0	0,0
01.AEA.001	Sinkronisasi, koordinasi capaian kinerja dan penyelesaian permasalahan lintas K/L terkait tata kelola administrasi hukum	2	kegiatan		475.435,0	2	2	2	0,0	0,0	0,0
01.AEA.001.005	Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit	2,0	kegiatan	237.717,5	475.435,0	2,0	2,0	2,0	0,0	0,0	0,0
02	Terwujudnya tindak lanjut rekomendasi kebijakan capaian kinerja dan penyelesaian permasalahan lintas K/L terkait Pemanfaatan, Pemberdayaan dan Pelindungan KI				989.658,0				0,0	0,0	0,0
02.ABD	Kebijakan Bidang Hukum dan HAM		Rekomendasi Kebijakan		527.895,0				0,0	0,0	0,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	TAHUN 2026			PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)						
		VOLUME / TARGET	SATUAN	SATUAN BIAYA	ALOKASI 2026 (RP RIBU)	VOLUME / TARGET			ALOKASI (RIBU)		
						2027	2028	2029	2027	2028	2029
02.ABD.002	Rekomendasi kebijakan capaian kinerja dan penyelesaian permasalahan lintas K/L terkait pemanfaatan, pemberdayaan dan perlindungan KI	2	Rekomendasi Kebijakan		527.895,0	2	2	2	0,0	0,0	0,0
02.ABD.002.005	Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit	2,0	Rekomendasi Kebijakan	263.947,5	527.895,0	2,0	2,0	2,0	0,0	0,0	0,0
02.AEA	Koordinasi		kegiatan		461.763,0				0,0	0,0	0,0
02.AEA.002	Sinkronisasi, koordinasi capaian kinerja dan penyelesaian permasalahan lintas K/L terkait pemanfaatan, pemberdayaan dan perlindungan KI	2	kegiatan		461.763,0	2	2	2	0,0	0,0	0,0
02.AEA.002.005	Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit	2,0	kegiatan	230.881,5	461.763,0	2,0	2,0	2,0	0,0	0,0	0,0
03	Terwujudnya tindak lanjut rekomendasi kebijakan capaian kinerja pembangunan hukum dan penyelesaian permasalahan lintas K/L terkait materi hukum dan keadilan restoratif				42.580.571,0				0,0	0,0	0,0
03.ABD	Kebijakan Bidang Hukum dan HAM		Rekomendasi Kebijakan		835.344,0				0,0	0,0	0,0
03.ABD.003	Rekomendasi kebijakan sinkronisasi dan koordinasi kelompok kerja nasional (Desk) pilar pembangunan hukum (materi hukum, kelembagaan hukum dan penegakan hukum)	1	Rekomendasi Kebijakan		279.510,0	1	1	0	0,0	0,0	0,0
03.ABD.003.005	Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit	1,0	Rekomendasi Kebijakan	279.510,0	279.510,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0
03.ABD.004	Rekomendasi kebijakan capaian kinerja dan penyelesaian permasalahan lintas K/L terkait materi hukum dan keadilan restoratif	2	Rekomendasi Kebijakan		555.834,0	2	2	2	0,0	0,0	0,0
03.ABD.004.005	Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit	2,0	Rekomendasi Kebijakan	277.917,0	555.834,0	2,0	2,0	2,0	0,0	0,0	0,0
03.AEA	Koordinasi		kegiatan		699.313,0				0,0	0,0	0,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	TAHUN 2026			PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)						
		VOLUME / TARGET	SATUAN	SATUAN BIAYA	ALOKASI 2026 (RP RIBU)	VOLUME / TARGET			ALOKASI (RIBU)		
						2027	2028	2029	2027	2028	2029
03.AEA.003	Sinkronisasi, koordinasi pembangunan hukum, capaian kinerja dan penyelesaian permasalahan lintas K/L terkait materi hukum dan keadilan restoratif	3	kegiatan		699.313,0	3	3	3	0,0	0,0	0,0
03.AEA.003.005	Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit	3,0	kegiatan	233.104,3	699.313,0	3,0	3,0	3,0	0,0	0,0	0,0
03.FAN	Pemenuhan Prioritas Direktif Presiden		Paket		40.766.404,0				0,0	0,0	0,0
03.FAN.ZZ1	Pemenuhan Prioritas Direktif Presiden	1	Paket		40.766.404,0	1	1	1	0,0	0,0	0,0
03.FAN.ZZ1.ZZ1	Pemenuhan Prioritas Direktif Presiden	1,0	Paket	40.766.404,0	40.766.404,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
03.PBD	Kebijakan Bidang Hukum dan HAM		Rekomendasi Kebijakan		279.510,0				0,0	0,0	0,0
03.PBD.001	Rekomendasi kebijakan penguatan substansi hukum pidana yang mengedepankan keadilan restoratif	1	Rekomendasi Kebijakan		279.510,0	1	1	1	0,0	0,0	0,0
03.PBD.001.005	Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit	1,0	Rekomendasi Kebijakan	279.510,0	279.510,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0
04	Terwujudnya tindak lanjut rekomendasi kebijakan capaian kinerja pembangunan hukum dan penyelesaian permasalahan lintas K/L terkait Budaya, Informasi dan Komunikasi Hukum				1.793.265,0				0,0	0,0	0,0
04.ABD	Kebijakan Bidang Hukum dan HAM		Rekomendasi Kebijakan		990.851,0				0,0	0,0	0,0
04.ABD.005	Rekomendasi kebijakan sinkronisasi dan koordinasi kelompok kerja nasional (Desk) pilar pembangunan hukum (budaya, informasi dan komunikasi hukum)	1	Rekomendasi Kebijakan		522.922,0	1	1	0	0,0	0,0	0,0
04.ABD.005.005	Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit	1,0	Rekomendasi Kebijakan	522.922,0	522.922,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	TAHUN 2026			PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)						
		VOLUME / TARGET	SATUAN	SATUAN BIAYA	ALOKASI 2026 (RP RIBU)	VOLUME / TARGET			ALOKASI (RIBU)		
						2027	2028	2029	2027	2028	2029
04.ABD.006	Rekomendasi kebijakan capaian kinerja dan penyelesaian permasalahan lintas K/L terkait budaya, informasi dan komunikasi hukum	2	Rekomendasi Kebijakan		467.929,0	2	2	2	0,0	0,0	0,0
04.ABD.006.005	Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit	1,0	Rekomendasi Kebijakan	467.929,0	467.929,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0
04.AEA	Koordinasi		kegiatan		802.414,0				0,0	0,0	0,0
04.AEA.004	Sinkronisasi, koordinasi pembangunan hukum, capaian kinerja dan penyelesaian permasalahan lintas K/L terkait budaya, informasi dan komunikasi hukum	3	kegiatan		802.414,0	3	3	3	0,0	0,0	0,0
04.AEA.004.005	Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit	3,0	kegiatan	267.471,3	802.414,0	3,0	3,0	3,0	0,0	0,0	0,0
05	Terwujudnya tindak lanjut rekomendasi kebijakan capaian kinerja dan penyelesaian permasalahan lintas K/L terkait Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan litigasi				1.061.417,0				0,0	0,0	0,0
05.ABD	Kebijakan Bidang Hukum dan HAM		Rekomendasi Kebijakan		562.234,0				0,0	0,0	0,0
05.ABD.007	Rekomendasi kebijakan capaian kinerja dan penyelesaian permasalahan lintas K/L terkait pembentukan peraturan perundang-undangan dan litigasi	2	Rekomendasi Kebijakan		562.234,0	2	2	2	0,0	0,0	0,0
05.ABD.007.005	Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit	1,0	Rekomendasi Kebijakan	562.234,0	562.234,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0
05.AEA	Koordinasi		kegiatan		499.183,0				0,0	0,0	0,0
05.AEA.005	Sinkronisasi, koordinasi capaian kinerja dan penyelesaian permasalahan lintas K/L terkait pembentukan peraturan perundang-undangan dan litigasi	2	kegiatan		499.183,0	2	2	2	0,0	0,0	0,0

[illegible]

[illegible]

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	JENIS KOMPONEN	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2026										
			RP	PNBP	BLU	PLN	RMP	PDN	HIBAH	PH	SBSN	HN	TOTAL
04.AEA	Koordinasi		802.414,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	802.414,0
04.AEA.004	Sinkronisasi, koordinasi pembangunan hukum, capaian kinerja dan penyelesaian permasalahan lintas K/L terkait budaya, informasi dan komunikasi hukum		802.414,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	802.414,0
04.AEA.004.005	Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit	Utama	802.414,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	802.414,0
05	Terwujudnya tindak lanjut rekomendasi kebijakan capaian kinerja dan penyelesaian permasalahan lintas K/L terkait Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan litigasi		1.061.417,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.061.417,0
05.ABD	Kebijakan Bidang Hukum dan HAM		562.234,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	562.234,0
05.ABD.007	Rekomendasi kebijakan capaian kinerja dan penyelesaian permasalahan lintas K/L terkait pembentukan peraturan perundang-undangan dan litigasi		562.234,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	562.234,0
05.ABD.007.005	Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit	Utama	562.234,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	562.234,0
05.AEA	Koordinasi		499.183,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	499.183,0
05.AEA.005	Sinkronisasi, koordinasi capaian kinerja dan penyelesaian permasalahan lintas K/L terkait pembentukan peraturan perundang-undangan dan litigasi		499.183,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	499.183,0
05.AEA.005.005	Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit	Utama	499.183,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	499.183,0
Total			47.437.170,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	47.437.170,0

Jakarta, 02 Maret 2026

REKAP 3A: KEGIATAN K/L

RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L)

TAHUN ANGGARAN 2026

1. KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG HUKUM, HAK ASASI MANUSIA, IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN
2. PROGRAM : CL - Program Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan
3. SASARAN PROGRAM : 01 - Terwujudnya pembangunan hukum, capaian kinerja dan penyelesaian permasalahan lintas K/L di bidang hukum
4. KEGIATAN : 7151 - Koordinasi Bidang Hukum
5. UNIT ORGANISASI (ESELON 2) : 03 - Deputi Bidang Koordinasi Hukum
10 - Asisten Deputi Koordinasi Materi Hukum dan Keadilan Restoratif
11 - Asisten Deputi Koordinasi Tata Kelola Administrasi Hukum
14 - Asisten Deputi Koordinasi Pemanfaatan, Pemberdayaan, dan Pelindungan Kekayaan Intelektual
15 - Asisten Deputi Koordinasi Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Litigasi
16 - Asisten Deputi Koordinasi Budaya, Informasi dan Komunikasi Hukum

6. SASARAN KEGIATAN

KODE	SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	TARGET 2026	ALOKASI 2026 (RIBU)
01	Terwujudnya tindak lanjut rekomendasi kebijakan capaian kinerja dan penyelesaian permasalahan lintas K/L terkait tata kelola administrasi hukum		1.012.259,0
01.01	Persentase rekomendasi kebijakan capaian kinerja terkait tata kelola administrasi hukum yang ditindaklanjuti	100	
01.02	Persentase rekomendasi kebijakan yang ditindaklanjuti oleh K/L terkait penyelesaian permasalahan lintas K/L di Bidang Tata Kelola Administrasi Hukum	100	
02	Terwujudnya tindak lanjut rekomendasi kebijakan capaian kinerja dan penyelesaian permasalahan lintas K/L terkait Pemanfaatan, Pemberdayaan dan Pelindungan KI		989.658,0
02.01	Persentase rekomendasi kebijakan capaian kinerja terkait pemanfaatan, pemberdayaan dan pelindungan KI yang ditindaklanjuti	100	
02.02	Persentase rekomendasi kebijakan yang ditindaklanjuti oleh K/L terkait penyelesaian permasalahan lintas K/L di Bidang Pemanfaatan, Pemberdayaan dan pelindungan KI	100	
03	Terwujudnya tindak lanjut rekomendasi kebijakan capaian kinerja pembangunan hukum dan penyelesaian permasalahan lintas K/L terkait materi hukum dan keadilan restoratif		42.580.571,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	TARGET 2026	ALOKASI 2026 (RIBU)
03.01	Persentase rekomendasi kebijakan terkait pilar pembangunan hukum (materi hukum, kelembagaan hukum dan penegakan hukum) yang ditindaklanjuti	100	
03.02	Persentase rekomendasi kebijakan capaian kinerja terkait Materi hukum dan Keadilan Restoratif yang ditindaklanjuti	100	
03.03	Persentase rekomendasi kebijakan yang ditindaklanjuti oleh K/L terkait penyelesaian permasalahan lintas K/L di Bidang materi hukum dan Keadilan Restoratif	100	
04	Terwujudnya tindak lanjut rekomendasi kebijakan capaian kinerja pembangunan hukum dan penyelesaian permasalahan lintas K/L terkait Budaya, Informasi dan Komunikasi Hukum		1.793.265,0
04.01	Persentase rekomendasi kebijakan terkait pilar pembangunan hukum (budaya, informasi dan komunikasi hukum) yang ditindaklanjuti	100	
04.02	Persentase rekomendasi kebijakan capaian kinerja terkait budaya, informasi dan komunikasi hukum yang ditindaklanjuti	100	
04.03	Persentase rekomendasi kebijakan yang ditindaklanjuti oleh K/L terkait penyelesaian permasalahan lintas K/L di Bidang Budaya, Informasi dan Komunikasi Hukum	100	
05	Terwujudnya tindak lanjut rekomendasi kebijakan capaian kinerja dan penyelesaian permasalahan lintas K/L terkait Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan litigasi		1.061.417,0
05.01	Persentase rekomendasi kebijakan capaian kinerja terkait pembentukan peraturan perundang-undangan dan litigasi yang ditindaklanjuti	100	
05.02	Persentase rekomendasi kebijakan yang ditindaklanjuti oleh K/L terkait penyelesaian permasalahan lintas K/L di Bidang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan litigasi	100	
Total			47.437.170,0

7. RINCIAN KEGIATAN

A. PEMETAAN KEGIATAN

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
Total											47.437.170,0

B. PERHITUNGAN PENDANAAN (TAHUN 2026 DAN PRAKIRAAN MAJU)

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	TAHUN 2026			PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)						
		VOLUME / TARGET	SATUAN	SATUAN BIAYA	ALOKASI 2026 (RP RIBU)	VOLUME / TARGET			ALOKASI (RIBU)		
						2027	2028	2029	2027	2028	2029
01	Terwujudnya tindak lanjut rekomendasi kebijakan capaian kinerja dan penyelesaian permasalahan lintas K/L terkait tata kelola administrasi hukum				1.012.259,0				0,0	0,0	0,0
01.ABD	Kebijakan Bidang Hukum dan HAM		Rekomendasi Kebijakan		536.824,0				0,0	0,0	0,0
01.ABD.001	Rekomendasi kebijakan capaian kinerja dan penyelesaian permasalahan lintas K/L terkait tata kelola administrasi hukum	2	Rekomendasi Kebijakan		536.824,0	2	2	2	0,0	0,0	0,0
01.ABD.001.005	Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit	2,0	Rekomendasi Kebijakan	268.412,0	536.824,0	2,0	2,0	2,0	0,0	0,0	0,0
01.AEA	Koordinasi		kegiatan		475.435,0				0,0	0,0	0,0
01.AEA.001	Sinkronisasi, koordinasi capaian kinerja dan penyelesaian permasalahan lintas K/L terkait tata kelola administrasi hukum	2	kegiatan		475.435,0	2	2	2	0,0	0,0	0,0
01.AEA.001.005	Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit	2,0	kegiatan	237.717,5	475.435,0	2,0	2,0	2,0	0,0	0,0	0,0
02	Terwujudnya tindak lanjut rekomendasi kebijakan capaian kinerja dan penyelesaian permasalahan lintas K/L terkait Pemanfaatan, Pemberdayaan dan Pelindungan KI				989.658,0				0,0	0,0	0,0
02.ABD	Kebijakan Bidang Hukum dan HAM		Rekomendasi Kebijakan		527.895,0				0,0	0,0	0,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	TAHUN 2026			PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)						
		VOLUME / TARGET	SATUAN	SATUAN BIAYA	ALOKASI 2026 (RP RIBU)	VOLUME / TARGET			ALOKASI (RIBU)		
						2027	2028	2029	2027	2028	2029
02.ABD.002	Rekomendasi kebijakan capaian kinerja dan penyelesaian permasalahan lintas K/L terkait pemanfaatan, pemberdayaan dan perlindungan KI	2	Rekomendasi Kebijakan		527.895,0	2	2	2	0,0	0,0	0,0
02.ABD.002.005	Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit	2,0	Rekomendasi Kebijakan	263.947,5	527.895,0	2,0	2,0	2,0	0,0	0,0	0,0
02.AEA	Koordinasi		kegiatan		461.763,0				0,0	0,0	0,0
02.AEA.002	Sinkronisasi, koordinasi capaian kinerja dan penyelesaian permasalahan lintas K/L terkait pemanfaatan, pemberdayaan dan perlindungan KI	2	kegiatan		461.763,0	2	2	2	0,0	0,0	0,0
02.AEA.002.005	Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit	2,0	kegiatan	230.881,5	461.763,0	2,0	2,0	2,0	0,0	0,0	0,0
03	Terwujudnya tindak lanjut rekomendasi kebijakan capaian kinerja pembangunan hukum dan penyelesaian permasalahan lintas K/L terkait materi hukum dan keadilan restoratif				42.580.571,0				0,0	0,0	0,0
03.ABD	Kebijakan Bidang Hukum dan HAM		Rekomendasi Kebijakan		835.344,0				0,0	0,0	0,0
03.ABD.003	Rekomendasi kebijakan sinkronisasi dan koordinasi kelompok kerja nasional (Desk) pilar pembangunan hukum (materi hukum, kelembagaan hukum dan penegakan hukum)	1	Rekomendasi Kebijakan		279.510,0	1	1	0	0,0	0,0	0,0
03.ABD.003.005	Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit	1,0	Rekomendasi Kebijakan	279.510,0	279.510,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0
03.ABD.004	Rekomendasi kebijakan capaian kinerja dan penyelesaian permasalahan lintas K/L terkait materi hukum dan keadilan restoratif	2	Rekomendasi Kebijakan		555.834,0	2	2	2	0,0	0,0	0,0
03.ABD.004.005	Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit	2,0	Rekomendasi Kebijakan	277.917,0	555.834,0	2,0	2,0	2,0	0,0	0,0	0,0
03.AEA	Koordinasi		kegiatan		699.313,0				0,0	0,0	0,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	TAHUN 2026			PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)						
		VOLUME / TARGET	SATUAN	SATUAN BIAYA	ALOKASI 2026 (RP RIBU)	VOLUME / TARGET			ALOKASI (RIBU)		
						2027	2028	2029	2027	2028	2029
03.AEA.003	Sinkronisasi, koordinasi pembangunan hukum, capaian kinerja dan penyelesaian permasalahan lintas K/L terkait materi hukum dan keadilan restoratif	3	kegiatan		699.313,0	3	3	3	0,0	0,0	0,0
03.AEA.003.005	Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit	3,0	kegiatan	233.104,3	699.313,0	3,0	3,0	3,0	0,0	0,0	0,0
03.FAN	Pemenuhan Prioritas Direktif Presiden		Paket		40.766.404,0				0,0	0,0	0,0
03.FAN.ZZ1	Pemenuhan Prioritas Direktif Presiden	1	Paket		40.766.404,0	1	1	1	0,0	0,0	0,0
03.FAN.ZZ1.ZZ1	Pemenuhan Prioritas Direktif Presiden	1,0	Paket	40.766.404,0	40.766.404,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
03.PBD	Kebijakan Bidang Hukum dan HAM		Rekomendasi Kebijakan		279.510,0				0,0	0,0	0,0
03.PBD.001	Rekomendasi kebijakan penguatan substansi hukum pidana yang mengedepankan keadilan restoratif	1	Rekomendasi Kebijakan		279.510,0	1	1	1	0,0	0,0	0,0
03.PBD.001.005	Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit	1,0	Rekomendasi Kebijakan	279.510,0	279.510,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0
04	Terwujudnya tindak lanjut rekomendasi kebijakan capaian kinerja pembangunan hukum dan penyelesaian permasalahan lintas K/L terkait Budaya, Informasi dan Komunikasi Hukum				1.793.265,0				0,0	0,0	0,0
04.ABD	Kebijakan Bidang Hukum dan HAM		Rekomendasi Kebijakan		990.851,0				0,0	0,0	0,0
04.ABD.005	Rekomendasi kebijakan sinkronisasi dan koordinasi kelompok kerja nasional (Desk) pilar pembangunan hukum (budaya, informasi dan komunikasi hukum)	1	Rekomendasi Kebijakan		522.922,0	1	1	0	0,0	0,0	0,0
04.ABD.005.005	Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit	1,0	Rekomendasi Kebijakan	522.922,0	522.922,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	TAHUN 2026			PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)						
		VOLUME / TARGET	SATUAN	SATUAN BIAYA	ALOKASI 2026 (RP RIBU)	VOLUME / TARGET			ALOKASI (RIBU)		
						2027	2028	2029	2027	2028	2029
04.ABD.006	Rekomendasi kebijakan capaian kinerja dan penyelesaian permasalahan lintas K/L terkait budaya, informasi dan komunikasi hukum	2	Rekomendasi Kebijakan		467.929,0	2	2	2	0,0	0,0	0,0
04.ABD.006.005	Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit	1,0	Rekomendasi Kebijakan	467.929,0	467.929,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0
04.AEA	Koordinasi		kegiatan		802.414,0				0,0	0,0	0,0
04.AEA.004	Sinkronisasi, koordinasi pembangunan hukum, capaian kinerja dan penyelesaian permasalahan lintas K/L terkait budaya, informasi dan komunikasi hukum	3	kegiatan		802.414,0	3	3	3	0,0	0,0	0,0
04.AEA.004.005	Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit	3,0	kegiatan	267.471,3	802.414,0	3,0	3,0	3,0	0,0	0,0	0,0
05	Terwujudnya tindak lanjut rekomendasi kebijakan capaian kinerja dan penyelesaian permasalahan lintas K/L terkait Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan litigasi				1.061.417,0				0,0	0,0	0,0
05.ABD	Kebijakan Bidang Hukum dan HAM		Rekomendasi Kebijakan		562.234,0				0,0	0,0	0,0
05.ABD.007	Rekomendasi kebijakan capaian kinerja dan penyelesaian permasalahan lintas K/L terkait pembentukan peraturan perundang-undangan dan litigasi	2	Rekomendasi Kebijakan		562.234,0	2	2	2	0,0	0,0	0,0
05.ABD.007.005	Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit	1,0	Rekomendasi Kebijakan	562.234,0	562.234,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0
05.AEA	Koordinasi		kegiatan		499.183,0				0,0	0,0	0,0
05.AEA.005	Sinkronisasi, koordinasi capaian kinerja dan penyelesaian permasalahan lintas K/L terkait pembentukan peraturan perundang-undangan dan litigasi	2	kegiatan		499.183,0	2	2	2	0,0	0,0	0,0

[illegible]

[illegible]

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	JENIS KOMPONEN	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2026										
			RP	PNBP	BLU	PLN	RMP	PDN	HIBAH	PH	SBSN	HN	TOTAL
04.AEA	Koordinasi		802.414,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	802.414,0
04.AEA.004	Sinkronisasi, koordinasi pembangunan hukum, capaian kinerja dan penyelesaian permasalahan lintas K/L terkait budaya, informasi dan komunikasi hukum		802.414,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	802.414,0
04.AEA.004.005	Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit	Utama	802.414,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	802.414,0
05	Terwujudnya tindak lanjut rekomendasi kebijakan capaian kinerja dan penyelesaian permasalahan lintas K/L terkait Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan litigasi		1.061.417,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.061.417,0
05.ABD	Kebijakan Bidang Hukum dan HAM		562.234,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	562.234,0
05.ABD.007	Rekomendasi kebijakan capaian kinerja dan penyelesaian permasalahan lintas K/L terkait pembentukan peraturan perundang-undangan dan litigasi		562.234,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	562.234,0
05.ABD.007.005	Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit	Utama	562.234,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	562.234,0
05.AEA	Koordinasi		499.183,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	499.183,0
05.AEA.005	Sinkronisasi, koordinasi capaian kinerja dan penyelesaian permasalahan lintas K/L terkait pembentukan peraturan perundang-undangan dan litigasi		499.183,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	499.183,0
05.AEA.005.005	Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit	Utama	499.183,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	499.183,0
Total			47.437.170,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	47.437.170,0

Jakarta, 02 Maret 2026

REKAP 3: KEGIATAN K/L

RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L)

TAHUN ANGGARAN 2026

- 1. KEMENTERIAN/LEMBAGA** : KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG HUKUM, HAK ASASI MANUSIA, IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN
- 2. PROGRAM** : CL - Program Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan
- 3. SASARAN PROGRAM** : 02 - Terwujudnya capaian kinerja dan penyelesaian permasalahan lintas K/L terkait penghormatan, pemajuan, perlindungan, penegakan dan pemenuhan HAM
- 4. KEGIATAN** : 7152 - Koordinasi Bidang Hak Asasi Manusia
- 5. UNIT ORGANISASI (ESELON 2)** :
 12 - Asisten Deputi Koordinasi Kebijakan Hak Asasi Manusia
 19 - Asisten Deputi Koordinasi Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat
 18 - Asisten Deputi Koordinasi Pembangunan dan Kerja Sama Hak Asasi Manusia
 21 - Asisten Deputi Koordinasi Pemberdayaan dan Pemajuan Hak Kelompok Rentan
 20 - Asisten Deputi Koordinasi Pendidikan Hak Asasi Manusia

6. SASARAN KEGIATAN

KODE	SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	TARGET 2026	ALOKASI 2026 (RIBU)
01	Terwujudnya tindak lanjut rekomendasi kebijakan capaian kinerja dan penyelesaian permasalahan lintas K/L terkait Kebijakan HAM		981.098,0
01.01	Persentase rekomendasi kebijakan capaian kinerja terkait kebijakan HAM yang ditindaklanjuti	100	
01.02	Persentase rekomendasi kebijakan yang ditindaklanjuti oleh K/L terkait penyelesaian permasalahan lintas K/L di bidang kebijakan HAM	100	
02	Terwujudnya tindak lanjut rekomendasi kebijakan capaian kinerja dan penyelesaian permasalahan lintas K/L terkait Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat		1.586.743,0
02.01	Persentase rekomendasi kebijakan capaian kinerja terkait penyelesaian pelanggaran HAM berat yang ditindaklanjuti	71	
02.02	Persentase rekomendasi kebijakan yang ditindaklanjuti oleh K/L terkait penyelesaian permasalahan lintas K/L di bidang pelanggaran HAM berat	71	
03	Terwujudnya tindak lanjut rekomendasi kebijakan capaian kinerja dan penyelesaian permasalahan lintas K/L terkait Pembangunan dan Kerja Sama HAM		1.021.842,0
03.01	Persentase rekomendasi kebijakan capaian kinerja terkait pembangunan dan kerja sama HAM yang ditindaklanjuti	100	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
05.ABD.006	Rekomendasi kebijakan capaian kinerja dan penyelesaian permasalahan lintas K/L terkait pendidikan HAM										840.643,0
	005 - Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit										840.643,0
		Pusat	Pusat								840.643,0
05.AEA	Koordinasi										146.446,0
05.AEA.005	Sinkronisasi, koordinasi capaian kinerja dan penyelesaian permasalahan lintas K/L terkait pendidikan HAM										146.446,0
	005 - Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit										146.446,0
		Pusat	Pusat								146.446,0
Total											5.582.432,0

B. PERHITUNGAN PENDANAAN (TAHUN 2026 DAN PRAKIRAAN MAJU)

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	TAHUN 2026			PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)						
		VOLUME / TARGET	SATUAN	SATUAN BIAYA	ALOKASI 2026 (RP RIBU)	VOLUME / TARGET			ALOKASI (RIBU)		
						2027	2028	2029	2027	2028	2029
01	Terwujudnya tindak lanjut rekomendasi kebijakan capaian kinerja dan penyelesaian permasalahan lintas K/L terkait Kebijakan HAM				981.098,0				0,0	0,0	0,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	TAHUN 2026			PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)						
		VOLUME / TARGET	SATUAN	SATUAN BIAYA	ALOKASI 2026 (RP RIBU)	VOLUME / TARGET			ALOKASI (RIBU)		
						2027	2028	2029	2027	2028	2029
01.ABD	Kebijakan Bidang Hukum dan HAM		Rekomendasi Kebijakan		513.556,0				0,0	0,0	0,0
01.ABD.001	Rekomendasi kebijakan capaian kinerja dan penyelesaian permasalahan lintas K/L terkait kebijakan HAM	2	Rekomendasi Kebijakan		513.556,0	2	2	2	0,0	0,0	0,0
01.ABD.001.005	Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit	2,0	Rekomendasi Kebijakan	256.778,0	513.556,0	2,0	2,0	2,0	0,0	0,0	0,0
01.AEA	Koordinasi		kegiatan		467.542,0				0,0	0,0	0,0
01.AEA.001	Sinkronisasi, koordinasi capaian kinerja dan penyelesaian permasalahan lintas K/L terkait kebijakan HAM	2	kegiatan		467.542,0	2	2	2	0,0	0,0	0,0
01.AEA.001.005	Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit	2,0	kegiatan	233.771,0	467.542,0	2,0	2,0	2,0	0,0	0,0	0,0
02	Terwujudnya tindak lanjut rekomendasi kebijakan capaian kinerja dan penyelesaian permasalahan lintas K/L terkait Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat				1.586.743,0				0,0	0,0	0,0
02.ABD	Kebijakan Bidang Hukum dan HAM		Rekomendasi Kebijakan		1.120.095,0				0,0	0,0	0,0
02.ABD.002	Rekomendasi kebijakan sinkronisasi dan koordinasi kelompok kerja nasional (Desk) pembangunan HAM terkait penyelesaian pelanggaran HAM berat	1	Rekomendasi Kebijakan		747.023,0	1	1	1	0,0	0,0	0,0
02.ABD.002.005	Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit	1,0	Rekomendasi Kebijakan	747.023,0	747.023,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0
02.ABD.003	Rekomendasi kebijakan capaian kinerja dan penyelesaian permasalahan lintas K/L terkait pelanggaran HAM berat	2	Rekomendasi Kebijakan		373.072,0	2	2	2	0,0	0,0	0,0
02.ABD.003.005	Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit	2,0	Rekomendasi Kebijakan	186.536,0	373.072,0	2,0	2,0	2,0	0,0	0,0	0,0
02.AEA	Koordinasi		kegiatan		466.648,0				0,0	0,0	0,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	TAHUN 2026			PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)						
		VOLUME / TARGET	SATUAN	SATUAN BIAYA	ALOKASI 2026 (RP RIBU)	VOLUME / TARGET			ALOKASI (RIBU)		
						2027	2028	2029	2027	2028	2029
02.AEA.002	Sinkronisasi, koordinasi pembangunan HAM, capaian kinerja dan penyelesaian permasalahan lintas K/L terkait pelanggaran HAM berat	3	kegiatan		466.648,0	3	3	3	0,0	0,0	0,0
02.AEA.002.005	Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit	3,0	kegiatan	155.549,3	466.648,0	3,0	3,0	3,0	0,0	0,0	0,0
03	Terwujudnya tindak lanjut rekomendasi kebijakan capaian kinerja dan penyelesaian permasalahan lintas K/L terkait Pembangunan dan Kerja Sama HAM				1.021.842,0				0,0	0,0	0,0
03.ABD	Kebijakan Bidang Hukum dan HAM		Rekomendasi Kebijakan		593.444,0				0,0	0,0	0,0
03.ABD.004	Rekomendasi kebijakan capaian kinerja dan penyelesaian permasalahan lintas K/L terkait pembangunan dan kerja sama HAM	2	Rekomendasi Kebijakan		593.444,0	2	2	2	0,0	0,0	0,0
03.ABD.004.005	Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit	2,0	Rekomendasi Kebijakan	296.722,0	593.444,0	2,0	2,0	2,0	0,0	0,0	0,0
03.AEA	Koordinasi		kegiatan		428.398,0				0,0	0,0	0,0
03.AEA.003	Sinkronisasi, koordinasi capaian kinerja dan penyelesaian permasalahan lintas K/L terkait pembangunan dan kerja sama HAM	2	kegiatan		428.398,0	2	2	2	0,0	0,0	0,0
03.AEA.003.005	Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit	2,0	kegiatan	214.199,0	428.398,0	2,0	2,0	2,0	0,0	0,0	0,0
04	Terwujudnya tindak lanjut rekomendasi kebijakan capaian kinerja dan penyelesaian permasalahan lintas K/L terkait Pemberdayaan dan Pemajuan Hak Kelompok Rentan				1.005.660,0				0,0	0,0	0,0
04.ABD	Kebijakan Bidang Hukum dan HAM		Rekomendasi Kebijakan		428.780,0				0,0	0,0	0,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	TAHUN 2026			PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)						
		VOLUME / TARGET	SATUAN	SATUAN BIAYA	ALOKASI 2026 (RP RIBU)	VOLUME / TARGET			ALOKASI (RIBU)		
						2027	2028	2029	2027	2028	2029
04.ABD.005	Rekomendasi kebijakan capaian kinerja dan penyelesaian permasalahan lintas K/L terkait pemberdayaan dan pemajuan hak kelompok rentan	2	Rekomendasi Kebijakan		428.780,0	2	2	2	0,0	0,0	0,0
04.ABD.005.005	Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit	2,0	Rekomendasi Kebijakan	214.390,0	428.780,0	2,0	2,0	2,0	0,0	0,0	0,0
04.AEA	Koordinasi		kegiatan		576.880,0				0,0	0,0	0,0
04.AEA.004	Sinkronisasi, koordinasi capaian kinerja dan penyelesaian permasalahan lintas K/L terkait pemberdayaan dan pemajuan hak kelompok rentan	2	kegiatan		576.880,0	2	2	2	0,0	0,0	0,0
04.AEA.004.005	Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit	2,0	kegiatan	288.440,0	576.880,0	2,0	2,0	2,0	0,0	0,0	0,0
05	Terwujudnya tindak lanjut rekomendasi kebijakan capaian kinerja dan penyelesaian permasalahan lintas K/L terkait Pendidikan HAM				987.089,0				0,0	0,0	0,0
05.ABD	Kebijakan Bidang Hukum dan HAM		Rekomendasi Kebijakan		840.643,0				0,0	0,0	0,0
05.ABD.006	Rekomendasi kebijakan capaian kinerja dan penyelesaian permasalahan lintas K/L terkait pendidikan HAM	2	Rekomendasi Kebijakan		840.643,0	2	2	2	0,0	0,0	0,0
05.ABD.006.005	Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit	1,0	Rekomendasi Kebijakan	840.643,0	840.643,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0
05.AEA	Koordinasi		kegiatan		146.446,0				0,0	0,0	0,0
05.AEA.005	Sinkronisasi, koordinasi capaian kinerja dan penyelesaian permasalahan lintas K/L terkait pendidikan HAM	2	kegiatan		146.446,0	2	2	2	0,0	0,0	0,0
05.AEA.005.005	Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit	2,0	kegiatan	73.223,0	146.446,0	2,0	2,0	2,0	0,0	0,0	0,0

[illegible]

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	JENIS KOMPONEN	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2026										
			RP	PNBP	BLU	PLN	RMP	PDN	HIBAH	PH	SBSN	HN	TOTAL
05.AEA.005.005	Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit	Utama	146.446,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	146.446,0
Total			5.582.432,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5.582.432,0

Jakarta, 02 Maret 2026

REKAP 3A: KEGIATAN K/L

RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L)

TAHUN ANGGARAN 2026

1. KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG HUKUM, HAK ASASI MANUSIA, IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN
2. PROGRAM : CL - Program Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan
3. SASARAN PROGRAM : 02 - Terwujudnya capaian kinerja dan penyelesaian permasalahan lintas K/L terkait penghormatan, pemajuan, perlindungan, penegakan dan pemenuhan HAM
4. KEGIATAN : 7152 - Koordinasi Bidang Hak Asasi Manusia
5. UNIT ORGANISASI (ESELON 2) : 12 - Asisten Deputi Koordinasi Kebijakan Hak Asasi Manusia
18 - Asisten Deputi Koordinasi Pembangunan dan Kerja Sama Hak Asasi Manusia
19 - Asisten Deputi Koordinasi Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat
20 - Asisten Deputi Koordinasi Pendidikan Hak Asasi Manusia
21 - Asisten Deputi Koordinasi Pemberdayaan dan Pemajuan Hak Kelompok Rentan

6. SASARAN KEGIATAN

KODE	SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	TARGET 2026	ALOKASI 2026 (RIBU)
01	Terwujudnya tindak lanjut rekomendasi kebijakan capaian kinerja dan penyelesaian permasalahan lintas K/L terkait Kebijakan HAM		981.098,0
01.01	Persentase rekomendasi kebijakan capaian kinerja terkait kebijakan HAM yang ditindaklanjuti	100	
01.02	Persentase rekomendasi kebijakan yang ditindaklanjuti oleh K/L terkait penyelesaian permasalahan lintas K/L di bidang kebijakan HAM	100	
02	Terwujudnya tindak lanjut rekomendasi kebijakan capaian kinerja dan penyelesaian permasalahan lintas K/L terkait Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat		1.586.743,0
02.01	Persentase rekomendasi kebijakan capaian kinerja terkait penyelesaian pelanggaran HAM berat yang ditindaklanjuti	71	
02.02	Persentase rekomendasi kebijakan yang ditindaklanjuti oleh K/L terkait penyelesaian permasalahan lintas K/L di bidang pelanggaran HAM berat	71	
03	Terwujudnya tindak lanjut rekomendasi kebijakan capaian kinerja dan penyelesaian permasalahan lintas K/L terkait Pembangunan dan Kerja Sama HAM		1.021.842,0
03.01	Persentase rekomendasi kebijakan capaian kinerja terkait pembangunan dan kerja sama HAM yang ditindaklanjuti	100	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
05.ABD.006	Rekomendasi kebijakan capaian kinerja dan penyelesaian permasalahan lintas K/L terkait pendidikan HAM										840.643,0
	005 - Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit										840.643,0
		Pusat	Pusat								840.643,0
05.AEA	Koordinasi										146.446,0
05.AEA.005	Sinkronisasi, koordinasi capaian kinerja dan penyelesaian permasalahan lintas K/L terkait pendidikan HAM										146.446,0
	005 - Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit										146.446,0
		Pusat	Pusat								146.446,0
Total											5.582.432,0

B. PERHITUNGAN PENDANAAN (TAHUN 2026 DAN PRAKIRAAN MAJU)

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	TAHUN 2026			PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)						
		VOLUME / TARGET	SATUAN	SATUAN BIAYA	ALOKASI 2026 (RP RIBU)	VOLUME / TARGET			ALOKASI (RIBU)		
						2027	2028	2029	2027	2028	2029
01	Terwujudnya tindak lanjut rekomendasi kebijakan capaian kinerja dan penyelesaian permasalahan lintas K/L terkait Kebijakan HAM				981.098,0				0,0	0,0	0,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	TAHUN 2026			PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)						
		VOLUME / TARGET	SATUAN	SATUAN BIAYA	ALOKASI 2026 (RP RIBU)	VOLUME / TARGET			ALOKASI (RIBU)		
						2027	2028	2029	2027	2028	2029
01.ABD	Kebijakan Bidang Hukum dan HAM		Rekomendasi Kebijakan		513.556,0				0,0	0,0	0,0
01.ABD.001	Rekomendasi kebijakan capaian kinerja dan penyelesaian permasalahan lintas K/L terkait kebijakan HAM	2	Rekomendasi Kebijakan		513.556,0	2	2	2	0,0	0,0	0,0
01.ABD.001.005	Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit	2,0	Rekomendasi Kebijakan	256.778,0	513.556,0	2,0	2,0	2,0	0,0	0,0	0,0
01.AEA	Koordinasi		kegiatan		467.542,0				0,0	0,0	0,0
01.AEA.001	Sinkronisasi, koordinasi capaian kinerja dan penyelesaian permasalahan lintas K/L terkait kebijakan HAM	2	kegiatan		467.542,0	2	2	2	0,0	0,0	0,0
01.AEA.001.005	Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit	2,0	kegiatan	233.771,0	467.542,0	2,0	2,0	2,0	0,0	0,0	0,0
02	Terwujudnya tindak lanjut rekomendasi kebijakan capaian kinerja dan penyelesaian permasalahan lintas K/L terkait Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat				1.586.743,0				0,0	0,0	0,0
02.ABD	Kebijakan Bidang Hukum dan HAM		Rekomendasi Kebijakan		1.120.095,0				0,0	0,0	0,0
02.ABD.002	Rekomendasi kebijakan sinkronisasi dan koordinasi kelompok kerja nasional (Desk) pembangunan HAM terkait penyelesaian pelanggaran HAM berat	1	Rekomendasi Kebijakan		747.023,0	1	1	1	0,0	0,0	0,0
02.ABD.002.005	Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit	1,0	Rekomendasi Kebijakan	747.023,0	747.023,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0
02.ABD.003	Rekomendasi kebijakan capaian kinerja dan penyelesaian permasalahan lintas K/L terkait pelanggaran HAM berat	2	Rekomendasi Kebijakan		373.072,0	2	2	2	0,0	0,0	0,0
02.ABD.003.005	Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit	2,0	Rekomendasi Kebijakan	186.536,0	373.072,0	2,0	2,0	2,0	0,0	0,0	0,0
02.AEA	Koordinasi		kegiatan		466.648,0				0,0	0,0	0,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	TAHUN 2026			PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)						
		VOLUME / TARGET	SATUAN	SATUAN BIAYA	ALOKASI 2026 (RP RIBU)	VOLUME / TARGET			ALOKASI (RIBU)		
						2027	2028	2029	2027	2028	2029
02.AEA.002	Sinkronisasi, koordinasi pembangunan HAM, capaian kinerja dan penyelesaian permasalahan lintas K/L terkait pelanggaran HAM berat	3	kegiatan		466.648,0	3	3	3	0,0	0,0	0,0
02.AEA.002.005	Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit	3,0	kegiatan	155.549,3	466.648,0	3,0	3,0	3,0	0,0	0,0	0,0
03	Terwujudnya tindak lanjut rekomendasi kebijakan capaian kinerja dan penyelesaian permasalahan lintas K/L terkait Pembangunan dan Kerja Sama HAM				1.021.842,0				0,0	0,0	0,0
03.ABD	Kebijakan Bidang Hukum dan HAM		Rekomendasi Kebijakan		593.444,0				0,0	0,0	0,0
03.ABD.004	Rekomendasi kebijakan capaian kinerja dan penyelesaian permasalahan lintas K/L terkait pembangunan dan kerja sama HAM	2	Rekomendasi Kebijakan		593.444,0	2	2	2	0,0	0,0	0,0
03.ABD.004.005	Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit	2,0	Rekomendasi Kebijakan	296.722,0	593.444,0	2,0	2,0	2,0	0,0	0,0	0,0
03.AEA	Koordinasi		kegiatan		428.398,0				0,0	0,0	0,0
03.AEA.003	Sinkronisasi, koordinasi capaian kinerja dan penyelesaian permasalahan lintas K/L terkait pembangunan dan kerja sama HAM	2	kegiatan		428.398,0	2	2	2	0,0	0,0	0,0
03.AEA.003.005	Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit	2,0	kegiatan	214.199,0	428.398,0	2,0	2,0	2,0	0,0	0,0	0,0
04	Terwujudnya tindak lanjut rekomendasi kebijakan capaian kinerja dan penyelesaian permasalahan lintas K/L terkait Pemberdayaan dan Pemajuan Hak Kelompok Rentan				1.005.660,0				0,0	0,0	0,0
04.ABD	Kebijakan Bidang Hukum dan HAM		Rekomendasi Kebijakan		428.780,0				0,0	0,0	0,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	TAHUN 2026			PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)						
		VOLUME / TARGET	SATUAN	SATUAN BIAYA	ALOKASI 2026 (RP RIBU)	VOLUME / TARGET			ALOKASI (RIBU)		
						2027	2028	2029	2027	2028	2029
04.ABD.005	Rekomendasi kebijakan capaian kinerja dan penyelesaian permasalahan lintas K/L terkait pemberdayaan dan pemajuan hak kelompok rentan	2	Rekomendasi Kebijakan		428.780,0	2	2	2	0,0	0,0	0,0
04.ABD.005.005	Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit	2,0	Rekomendasi Kebijakan	214.390,0	428.780,0	2,0	2,0	2,0	0,0	0,0	0,0
04.AEA	Koordinasi		kegiatan		576.880,0				0,0	0,0	0,0
04.AEA.004	Sinkronisasi, koordinasi capaian kinerja dan penyelesaian permasalahan lintas K/L terkait pemberdayaan dan pemajuan hak kelompok rentan	2	kegiatan		576.880,0	2	2	2	0,0	0,0	0,0
04.AEA.004.005	Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit	2,0	kegiatan	288.440,0	576.880,0	2,0	2,0	2,0	0,0	0,0	0,0
05	Terwujudnya tindak lanjut rekomendasi kebijakan capaian kinerja dan penyelesaian permasalahan lintas K/L terkait Pendidikan HAM				987.089,0				0,0	0,0	0,0
05.ABD	Kebijakan Bidang Hukum dan HAM		Rekomendasi Kebijakan		840.643,0				0,0	0,0	0,0
05.ABD.006	Rekomendasi kebijakan capaian kinerja dan penyelesaian permasalahan lintas K/L terkait pendidikan HAM	2	Rekomendasi Kebijakan		840.643,0	2	2	2	0,0	0,0	0,0
05.ABD.006.005	Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit	1,0	Rekomendasi Kebijakan	840.643,0	840.643,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0
05.AEA	Koordinasi		kegiatan		146.446,0				0,0	0,0	0,0
05.AEA.005	Sinkronisasi, koordinasi capaian kinerja dan penyelesaian permasalahan lintas K/L terkait pendidikan HAM	2	kegiatan		146.446,0	2	2	2	0,0	0,0	0,0
05.AEA.005.005	Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit	2,0	kegiatan	73.223,0	146.446,0	2,0	2,0	2,0	0,0	0,0	0,0

[illegible]

[illegible]

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	JENIS KOMPONEN	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2026										
			RP	PNBP	BLU	PLN	RMP	PDN	HIBAH	PH	SBSN	HN	TOTAL
05.AEA.005.005	Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit	Utama	146.446,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	146.446,0
Total			5.582.432,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5.582.432,0

Jakarta, 02 Maret 2026

REKAP 3: KEGIATAN K/L

RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L)

TAHUN ANGGARAN 2026

1. KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG HUKUM, HAK ASASI MANUSIA, IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN
2. PROGRAM : CL - Program Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan
3. SASARAN PROGRAM : 03 - Terwujudnya capaian kinerja dan penyelesaian permasalahan lintas K/L terkait Keimigrasian dan Pemasyarakatan
4. KEGIATAN : 7153 - Koordinasi Bidang Keimigrasian dan Pemasyarakatan
5. UNIT ORGANISASI (ESELON 2) : 25 - Asisten Deputi Koordinasi Tata Kelola Keimigrasian
26 - Asisten Deputi Koordinasi Strategi Pelayanan Keimigrasian
27 - Asisten Deputi Koordinasi Tata Kelola Pemasyarakatan
24 - Asisten Deputi Koordinasi Strategi Pelayanan Pemasyarakatan
23 - Asisten Deputi Koordinasi Kerja Sama Kelembagaan Keimigrasian dan Pemasyarakatan

6. SASARAN KEGIATAN

KODE	SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	TARGET 2026	ALOKASI 2026 (RIBU)
01	Terwujudnya tindak lanjut rekomendasi kebijakan capaian kinerja dan penyelesaian permasalahan lintas K/L terkait Tata Kelola Keimigrasian		1.033.953,0
01.01	Persentase rekomendasi kebijakan capaian kinerja terkait tata kelola keimigrasian yang ditindaklanjuti	100	
01.02	Persentase rekomendasi kebijakan yang ditindaklanjuti oleh K/L terkait penyelesaian permasalahan lintas K/L di bidang tata kelola keimigrasian	100	
02	Terwujudnya tindak lanjut rekomendasi kebijakan capaian kinerja dan penyelesaian permasalahan lintas K/L terkait Strategi Pelayanan Keimigrasian		1.389.683,0
02.01	Persentase rekomendasi kebijakan capaian kinerja terkait strategi pelayanan keimigrasian yang ditindaklanjuti	100	
02.02	Persentase rekomendasi kebijakan yang ditindaklanjuti oleh K/L terkait penyelesaian permasalahan lintas K/L di bidang strategi pelayanan keimigrasian	100	
03	Terwujudnya tindak lanjut rekomendasi kebijakan capaian kinerja dan penyelesaian permasalahan lintas K/L terkait Tata Kelola Pemasyarakatan		1.044.056,0
03.01	Persentase rekomendasi kebijakan capaian kinerja terkait tata kelola pemasyarakatan yang ditindaklanjuti	100	

KODE	SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	TARGET 2026	ALOKASI 2026 (RIBU)
03.02	Persentase rekomendasi kebijakan yang ditindaklanjuti oleh K/L terkait penyelesaian permasalahan lintas K/L di bidang tata kelola masyarakat	100	
04	Terwujudnya tindak lanjut rekomendasi kebijakan capaian kinerja dan penyelesaian permasalahan lintas K/L terkait strategi pelayanan masyarakat		1.297.983,0
04.01	Persentase rekomendasi kebijakan capaian kinerja terkait strategi pelayanan masyarakat yang ditindaklanjuti	100	
04.02	Persentase rekomendasi kebijakan yang ditindaklanjuti oleh K/L terkait penyelesaian permasalahan lintas K/L di bidang strategi pelayanan masyarakat	100	
05	Terwujudnya tindak lanjut rekomendasi kebijakan capaian kinerja dan penyelesaian permasalahan lintas K/L terkait kerja sama kelembagaan keimigrasian dan masyarakat		1.077.057,0
05.01	Persentase rekomendasi kebijakan capaian kinerja terkait kerja sama kelembagaan keimigrasian dan masyarakat yang ditindaklanjuti	100	
05.02	Persentase rekomendasi kebijakan yang ditindaklanjuti oleh K/L terkait penyelesaian permasalahan lintas K/L di bidang kerja sama kelembagaan keimigrasian dan masyarakat	100	
Total			5.842.732,0

7. RINCIAN KEGIATAN

A. PEMETAAN KEGIATAN

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
05.AEA	Koordinasi										618.005,0
05.AEA.005	Sinkronisasi, koordinasi capaian kinerja dan penyelesaian permasalahan lintas K/L terkait kerja sama kelembagaan keimigrasian dan pemasyarakatan										618.005,0
	005 - Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit										618.005,0
		Pusat	Pusat								618.005,0
Total											5.842.732,0

B. PERHITUNGAN PENDANAAN (TAHUN 2026 DAN PRAKIRAAN MAJU)

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	TAHUN 2026			PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)						
		VOLUME / TARGET	SATUAN	SATUAN BIAYA	ALOKASI 2026 (RP RIBU)	VOLUME / TARGET			ALOKASI (RIBU)		
						2027	2028	2029	2027	2028	2029
01	Terwujudnya tindak lanjut rekomendasi kebijakan capaian kinerja dan penyelesaian permasalahan lintas K/L terkait Tata Kelola Keimigrasian				1.033.953,0				0,0	0,0	0,0
01.ABD	Kebijakan Bidang Hukum dan HAM		Rekomendasi Kebijakan		430.773,0				0,0	0,0	0,0
01.ABD.001	Rekomendasi kebijakan capaian kinerja dan penyelesaian permasalahan lintas K/L terkait tata kelola keimigrasian	2	Rekomendasi Kebijakan		430.773,0	2	2	2	0,0	0,0	0,0
01.ABD.001.005	Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit	2,0	Rekomendasi Kebijakan	215.386,5	430.773,0	2,0	2,0	2,0	0,0	0,0	0,0
01.AEA	Koordinasi		kegiatan		603.180,0				0,0	0,0	0,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	TAHUN 2026			PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)						
		VOLUME / TARGET	SATUAN	SATUAN BIAYA	ALOKASI 2026 (RP RIBU)	VOLUME / TARGET			ALOKASI (RIBU)		
						2027	2028	2029	2027	2028	2029
01.AEA.001	Sinkronisasi, koordinasi capaian kinerja dan penyelesaian permasalahan lintas K/L terkait tata kelola keimigrasian	2	kegiatan		603.180,0	2	2	2	0,0	0,0	0,0
01.AEA.001.005	Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit	2,0	kegiatan	301.590,0	603.180,0	2,0	2,0	2,0	0,0	0,0	0,0
02	Terwujudnya tindak lanjut rekomendasi kebijakan capaian kinerja dan penyelesaian permasalahan lintas K/L terkait Strategi Pelayanan Keimigrasian				1.389.683,0				0,0	0,0	0,0
02.ABD	Kebijakan Bidang Hukum dan HAM		Rekomendasi Kebijakan		928.971,0				0,0	0,0	0,0
02.ABD.002	Rekomendasi kebijakan sinkronisasi dan koordinasi kelompok kerja nasional (Desk) Penegakan dan pelayanan keimigrasian terkait strategi pelayanan keimigrasian	1	Rekomendasi Kebijakan		429.087,0	1	1	1	0,0	0,0	0,0
02.ABD.002.005	Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit	1,0	Rekomendasi Kebijakan	429.087,0	429.087,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0
02.ABD.003	Rekomendasi kebijakan capaian kinerja dan penyelesaian permasalahan lintas K/L terkait strategi pelayanan keimigrasian	2	Rekomendasi Kebijakan		499.884,0	2	2	2	0,0	0,0	0,0
02.ABD.003.005	Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit	2,0	Rekomendasi Kebijakan	249.942,0	499.884,0	2,0	2,0	2,0	0,0	0,0	0,0
02.AEA	Koordinasi		kegiatan		460.712,0				0,0	0,0	0,0
02.AEA.002	Sinkronisasi, koordinasi penegakan dan pelayanan keimigrasian, capaian kinerja dan penyelesaian permasalahan lintas K/L terkait strategi pelayanan keimigrasian	3	kegiatan		460.712,0	3	3	3	0,0	0,0	0,0
02.AEA.002.005	Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit	3,0	kegiatan	153.570,7	460.712,0	3,0	3,0	3,0	0,0	0,0	0,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	TAHUN 2026			PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)						
		VOLUME / TARGET	SATUAN	SATUAN BIAYA	ALOKASI 2026 (RP RIBU)	VOLUME / TARGET			ALOKASI (RIBU)		
						2027	2028	2029	2027	2028	2029
03	Terwujudnya tindak lanjut rekomendasi kebijakan capaian kinerja dan penyelesaian permasalahan lintas K/L terkait Tata Kelola Pemasyarakatan				1.044.056,0				0,0	0,0	0,0
03.ABD	Kebijakan Bidang Hukum dan HAM		Rekomendasi Kebijakan		222.348,0				0,0	0,0	0,0
03.ABD.004	Rekomendasi kebijakan capaian kinerja dan penyelesaian permasalahan lintas K/L terkait tata kelola pemasyarakatan	2	Rekomendasi Kebijakan		222.348,0	2	2	2	0,0	0,0	0,0
03.ABD.004.005	Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit	2,0	Rekomendasi Kebijakan	111.174,0	222.348,0	2,0	2,0	2,0	0,0	0,0	0,0
03.AEA	Koordinasi		kegiatan		821.708,0				0,0	0,0	0,0
03.AEA.003	Sinkronisasi, koordinasi capaian kinerja dan penyelesaian permasalahan lintas K/L terkait tata kelola pemasyarakatan	2	kegiatan		821.708,0	2	2	2	0,0	0,0	0,0
03.AEA.003.005	Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit	2,0	kegiatan	410.854,0	821.708,0	2,0	2,0	2,0	0,0	0,0	0,0
04	Terwujudnya tindak lanjut rekomendasi kebijakan capaian kinerja dan penyelesaian permasalahan lintas K/L terkait strategi pelayanan pemasyarakatan				1.297.983,0				0,0	0,0	0,0
04.ABD	Kebijakan Bidang Hukum dan HAM		Rekomendasi Kebijakan		840.720,0				0,0	0,0	0,0
04.ABD.005	Rekomendasi kebijakan sinkronisasi dan koordinasi kelompok kerja nasional (Desk) penegakan hukum perlakuan pemasyarakatan terkait strategi pelayanan pemasyarakatan	1	Rekomendasi Kebijakan		491.333,0	1	1	1	0,0	0,0	0,0
04.ABD.005.005	Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit	1,0	Rekomendasi Kebijakan	491.333,0	491.333,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0
04.ABD.006	Rekomendasi kebijakan capaian kinerja dan penyelesaian permasalahan lintas K/L terkait strategi pelayanan pemasyarakatan	2	Rekomendasi Kebijakan		349.387,0	2	2	2	0,0	0,0	0,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	TAHUN 2026			PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)						
		VOLUME / TARGET	SATUAN	SATUAN BIAYA	ALOKASI 2026 (RP RIBU)	VOLUME / TARGET			ALOKASI (RIBU)		
						2027	2028	2029	2027	2028	2029
04.ABD.006.005	Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit	1,0	Rekomendasi Kebijakan	349.387,0	349.387,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0
04.AEA	Koordinasi		kegiatan		457.263,0				0,0	0,0	0,0
04.AEA.004	Sinkronisasi, koordinasi penegakan hukum perlakuan masyarakat, capaian kinerja dan penyelesaian permasalahan lintas K/L terkait strategi pelayanan masyarakat	3	kegiatan		457.263,0	3	3	3	0,0	0,0	0,0
04.AEA.004.005	Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit	3,0	kegiatan	152.421,0	457.263,0	3,0	3,0	3,0	0,0	0,0	0,0
05	Terwujudnya tindak lanjut rekomendasi kebijakan capaian kinerja dan penyelesaian permasalahan lintas K/L terkait kerja sama kelembagaan keimigrasian dan masyarakat				1.077.057,0				0,0	0,0	0,0
05.ABD	Kebijakan Bidang Hukum dan HAM		Rekomendasi Kebijakan		459.052,0				0,0	0,0	0,0
05.ABD.007	Rekomendasi kebijakan capaian kinerja dan penyelesaian permasalahan lintas K/L terkait kerja sama kelembagaan keimigrasian dan masyarakat	2	Rekomendasi Kebijakan		459.052,0	2	2	2	0,0	0,0	0,0
05.ABD.007.005	Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit	0,0	Rekomendasi Kebijakan	Infinity	459.052,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
05.AEA	Koordinasi		kegiatan		618.005,0				0,0	0,0	0,0
05.AEA.005	Sinkronisasi, koordinasi capaian kinerja dan penyelesaian permasalahan lintas K/L terkait kerja sama kelembagaan keimigrasian dan masyarakat	2	kegiatan		618.005,0	2	2	2	0,0	0,0	0,0
05.AEA.005.005	Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit	2,0	kegiatan	309.002,5	618.005,0	2,0	2,0	2,0	0,0	0,0	0,0
Total					5.842.732,0	-	-	-	0,0	0,0	0,0

C. SUMBER PENDANAAN

[illegible]

[illegible]

[illegible]

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	JENIS KOMPONEN	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2026										
			RP	PNBP	BLU	PLN	RMP	PDN	HIBAH	PH	SBSN	HN	TOTAL
05.AEA.005.005	Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit	Utama	618.005,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	618.005,0
Total			5.842.732,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5.842.732,0

Jakarta, 02 Maret 2026

REKAP 3A: KEGIATAN K/L

RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L)

TAHUN ANGGARAN 2026

1. KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG HUKUM, HAK ASASI MANUSIA, IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN
2. PROGRAM : CL - Program Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan
3. SASARAN PROGRAM : 03 - Terwujudnya capaian kinerja dan penyelesaian permasalahan lintas K/L terkait Keimigrasian dan Pemasyarakatan
4. KEGIATAN : 7153 - Koordinasi Bidang Keimigrasian dan Pemasyarakatan
5. UNIT ORGANISASI (ESELON 2) : 23 - Asisten Deputi Koordinasi Kerja Sama Kelembagaan Keimigrasian dan Pemasyarakatan
24 - Asisten Deputi Koordinasi Strategi Pelayanan Pemasyarakatan
25 - Asisten Deputi Koordinasi Tata Kelola Keimigrasian
26 - Asisten Deputi Koordinasi Strategi Pelayanan Keimigrasian
27 - Asisten Deputi Koordinasi Tata Kelola Pemasyarakatan

6. SASARAN KEGIATAN

KODE	SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	TARGET 2026	ALOKASI 2026 (RIBU)
01	Terwujudnya tindak lanjut rekomendasi kebijakan capaian kinerja dan penyelesaian permasalahan lintas K/L terkait Tata Kelola Keimigrasian		1.033.953,0
01.01	Persentase rekomendasi kebijakan capaian kinerja terkait tata kelola keimigrasian yang ditindaklanjuti	100	
01.02	Persentase rekomendasi kebijakan yang ditindaklanjuti oleh K/L terkait penyelesaian permasalahan lintas K/L di bidang tata kelola keimigrasian	100	
02	Terwujudnya tindak lanjut rekomendasi kebijakan capaian kinerja dan penyelesaian permasalahan lintas K/L terkait Strategi Pelayanan Keimigrasian		1.389.683,0
02.01	Persentase rekomendasi kebijakan capaian kinerja terkait strategi pelayanan keimigrasian yang ditindaklanjuti	100	
02.02	Persentase rekomendasi kebijakan yang ditindaklanjuti oleh K/L terkait penyelesaian permasalahan lintas K/L di bidang strategi pelayanan keimigrasian	100	
03	Terwujudnya tindak lanjut rekomendasi kebijakan capaian kinerja dan penyelesaian permasalahan lintas K/L terkait Tata Kelola Pemasyarakatan		1.044.056,0
03.01	Persentase rekomendasi kebijakan capaian kinerja terkait tata kelola pemasyarakatan yang ditindaklanjuti	100	

KODE	SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	TARGET 2026	ALOKASI 2026 (RIBU)
03.02	Persentase rekomendasi kebijakan yang ditindaklanjuti oleh K/L terkait penyelesaian permasalahan lintas K/L di bidang tata kelola masyarakat	100	
04	Terwujudnya tindak lanjut rekomendasi kebijakan capaian kinerja dan penyelesaian permasalahan lintas K/L terkait strategi pelayanan masyarakat		1.297.983,0
04.01	Persentase rekomendasi kebijakan capaian kinerja terkait strategi pelayanan masyarakat yang ditindaklanjuti	100	
04.02	Persentase rekomendasi kebijakan yang ditindaklanjuti oleh K/L terkait penyelesaian permasalahan lintas K/L di bidang strategi pelayanan masyarakat	100	
05	Terwujudnya tindak lanjut rekomendasi kebijakan capaian kinerja dan penyelesaian permasalahan lintas K/L terkait kerja sama kelembagaan keimigrasian dan masyarakat		1.077.057,0
05.01	Persentase rekomendasi kebijakan capaian kinerja terkait kerja sama kelembagaan keimigrasian dan masyarakat yang ditindaklanjuti	100	
05.02	Persentase rekomendasi kebijakan yang ditindaklanjuti oleh K/L terkait penyelesaian permasalahan lintas K/L di bidang kerja sama kelembagaan keimigrasian dan masyarakat	100	
Total			5.842.732,0

7. RINCIAN KEGIATAN

A. PEMETAAN KEGIATAN

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
05.AEA	Koordinasi										618.005,0
05.AEA.005	Sinkronisasi, koordinasi capaian kinerja dan penyelesaian permasalahan lintas K/L terkait kerja sama kelembagaan keimigrasian dan pemasyarakatan										618.005,0
	005 - Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit										618.005,0
		Pusat	Pusat								618.005,0
Total											5.842.732,0

B. PERHITUNGAN PENDANAAN (TAHUN 2026 DAN PRAKIRAAN MAJU)

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	TAHUN 2026			PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)						
		VOLUME / TARGET	SATUAN	SATUAN BIAYA	ALOKASI 2026 (RP RIBU)	VOLUME / TARGET			ALOKASI (RIBU)		
						2027	2028	2029	2027	2028	2029
01	Terwujudnya tindak lanjut rekomendasi kebijakan capaian kinerja dan penyelesaian permasalahan lintas K/L terkait Tata Kelola Keimigrasian				1.033.953,0				0,0	0,0	0,0
01.ABD	Kebijakan Bidang Hukum dan HAM		Rekomendasi Kebijakan		430.773,0				0,0	0,0	0,0
01.ABD.001	Rekomendasi kebijakan capaian kinerja dan penyelesaian permasalahan lintas K/L terkait tata kelola keimigrasian	2	Rekomendasi Kebijakan		430.773,0	2	2	2	0,0	0,0	0,0
01.ABD.001.005	Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit	2,0	Rekomendasi Kebijakan	215.386,5	430.773,0	2,0	2,0	2,0	0,0	0,0	0,0
01.AEA	Koordinasi		kegiatan		603.180,0				0,0	0,0	0,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	TAHUN 2026			PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)						
		VOLUME / TARGET	SATUAN	SATUAN BIAYA	ALOKASI 2026 (RP RIBU)	VOLUME / TARGET			ALOKASI (RIBU)		
						2027	2028	2029	2027	2028	2029
01.AEA.001	Sinkronisasi, koordinasi capaian kinerja dan penyelesaian permasalahan lintas K/L terkait tata kelola keimigrasian	2	kegiatan		603.180,0	2	2	2	0,0	0,0	0,0
01.AEA.001.005	Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit	2,0	kegiatan	301.590,0	603.180,0	2,0	2,0	2,0	0,0	0,0	0,0
02	Terwujudnya tindak lanjut rekomendasi kebijakan capaian kinerja dan penyelesaian permasalahan lintas K/L terkait Strategi Pelayanan Keimigrasian				1.389.683,0				0,0	0,0	0,0
02.ABD	Kebijakan Bidang Hukum dan HAM		Rekomendasi Kebijakan		928.971,0				0,0	0,0	0,0
02.ABD.002	Rekomendasi kebijakan sinkronisasi dan koordinasi kelompok kerja nasional (Desk) Penegakan dan pelayanan keimigrasian terkait strategi pelayanan keimigrasian	1	Rekomendasi Kebijakan		429.087,0	1	1	1	0,0	0,0	0,0
02.ABD.002.005	Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit	1,0	Rekomendasi Kebijakan	429.087,0	429.087,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0
02.ABD.003	Rekomendasi kebijakan capaian kinerja dan penyelesaian permasalahan lintas K/L terkait strategi pelayanan keimigrasian	2	Rekomendasi Kebijakan		499.884,0	2	2	2	0,0	0,0	0,0
02.ABD.003.005	Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit	2,0	Rekomendasi Kebijakan	249.942,0	499.884,0	2,0	2,0	2,0	0,0	0,0	0,0
02.AEA	Koordinasi		kegiatan		460.712,0				0,0	0,0	0,0
02.AEA.002	Sinkronisasi, koordinasi penegakan dan pelayanan keimigrasian, capaian kinerja dan penyelesaian permasalahan lintas K/L terkait strategi pelayanan keimigrasian	3	kegiatan		460.712,0	3	3	3	0,0	0,0	0,0
02.AEA.002.005	Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit	3,0	kegiatan	153.570,7	460.712,0	3,0	3,0	3,0	0,0	0,0	0,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	TAHUN 2026			PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)						
		VOLUME / TARGET	SATUAN	SATUAN BIAYA	ALOKASI 2026 (RP RIBU)	VOLUME / TARGET			ALOKASI (RIBU)		
						2027	2028	2029	2027	2028	2029
03	Terwujudnya tindak lanjut rekomendasi kebijakan capaian kinerja dan penyelesaian permasalahan lintas K/L terkait Tata Kelola Pemasyarakatan				1.044.056,0				0,0	0,0	0,0
03.ABD	Kebijakan Bidang Hukum dan HAM		Rekomendasi Kebijakan		222.348,0				0,0	0,0	0,0
03.ABD.004	Rekomendasi kebijakan capaian kinerja dan penyelesaian permasalahan lintas K/L terkait tata kelola pemasyarakatan	2	Rekomendasi Kebijakan		222.348,0	2	2	2	0,0	0,0	0,0
03.ABD.004.005	Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit	2,0	Rekomendasi Kebijakan	111.174,0	222.348,0	2,0	2,0	2,0	0,0	0,0	0,0
03.AEA	Koordinasi		kegiatan		821.708,0				0,0	0,0	0,0
03.AEA.003	Sinkronisasi, koordinasi capaian kinerja dan penyelesaian permasalahan lintas K/L terkait tata kelola pemasyarakatan	2	kegiatan		821.708,0	2	2	2	0,0	0,0	0,0
03.AEA.003.005	Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit	2,0	kegiatan	410.854,0	821.708,0	2,0	2,0	2,0	0,0	0,0	0,0
04	Terwujudnya tindak lanjut rekomendasi kebijakan capaian kinerja dan penyelesaian permasalahan lintas K/L terkait strategi pelayanan pemasyarakatan				1.297.983,0				0,0	0,0	0,0
04.ABD	Kebijakan Bidang Hukum dan HAM		Rekomendasi Kebijakan		840.720,0				0,0	0,0	0,0
04.ABD.005	Rekomendasi kebijakan sinkronisasi dan koordinasi kelompok kerja nasional (Desk) penegakan hukum perlakuan pemasyarakatan terkait strategi pelayanan pemasyarakatan	1	Rekomendasi Kebijakan		491.333,0	1	1	1	0,0	0,0	0,0
04.ABD.005.005	Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit	1,0	Rekomendasi Kebijakan	491.333,0	491.333,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0
04.ABD.006	Rekomendasi kebijakan capaian kinerja dan penyelesaian permasalahan lintas K/L terkait strategi pelayanan pemasyarakatan	2	Rekomendasi Kebijakan		349.387,0	2	2	2	0,0	0,0	0,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	TAHUN 2026			PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)						
		VOLUME / TARGET	SATUAN	SATUAN BIAYA	ALOKASI 2026 (RP RIBU)	VOLUME / TARGET			ALOKASI (RIBU)		
						2027	2028	2029	2027	2028	2029
04.ABD.006.005	Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit	1,0	Rekomendasi Kebijakan	349.387,0	349.387,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0
04.AEA	Koordinasi		kegiatan		457.263,0				0,0	0,0	0,0
04.AEA.004	Sinkronisasi, koordinasi penegakan hukum perlakuan masyarakatan, capaian kinerja dan penyelesaian permasalahan lintas K/L terkait strategi pelayanan masyarakatan	3	kegiatan		457.263,0	3	3	3	0,0	0,0	0,0
04.AEA.004.005	Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit	3,0	kegiatan	152.421,0	457.263,0	3,0	3,0	3,0	0,0	0,0	0,0
05	Terwujudnya tindak lanjut rekomendasi kebijakan capaian kinerja dan penyelesaian permasalahan lintas K/L terkait kerja sama kelembagaan keimigrasian dan masyarakatan				1.077.057,0				0,0	0,0	0,0
05.ABD	Kebijakan Bidang Hukum dan HAM		Rekomendasi Kebijakan		459.052,0				0,0	0,0	0,0
05.ABD.007	Rekomendasi kebijakan capaian kinerja dan penyelesaian permasalahan lintas K/L terkait kerja sama kelembagaan keimigrasian dan masyarakatan	2	Rekomendasi Kebijakan		459.052,0	2	2	2	0,0	0,0	0,0
05.ABD.007.005	Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit	0,0	Rekomendasi Kebijakan	0,0	459.052,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
05.AEA	Koordinasi		kegiatan		618.005,0				0,0	0,0	0,0
05.AEA.005	Sinkronisasi, koordinasi capaian kinerja dan penyelesaian permasalahan lintas K/L terkait kerja sama kelembagaan keimigrasian dan masyarakatan	2	kegiatan		618.005,0	2	2	2	0,0	0,0	0,0
05.AEA.005.005	Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit	2,0	kegiatan	309.002,5	618.005,0	2,0	2,0	2,0	0,0	0,0	0,0
Total					5.842.732,0	-	-	-	0,0	0,0	0,0

C. SUMBER PENDANAAN

[illegible]

[illegible]

[illegible]

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	JENIS KOMPONEN	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2026										
			RP	PNBP	BLU	PLN	RMP	PDN	HIBAH	PH	SBSN	HN	TOTAL
05.AEA.005.005	Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit	Utama	618.005,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	618.005,0
Total			5.842.732,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5.842.732,0

Jakarta, 02 Maret 2026